

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana film *Pengepungan di Bukit Duri* merepresentasikan kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa dalam konteks relasi kuasa yang timpang di masyarakat Indonesia. Film dipahami tidak hanya menjadi sebagai karya fiksi ataupun hiburan, tapi sebagai produk budaya yang merefleksikan dan juga membentuk makna sosial terhadap peristiwa kekerasan rasial, khususnya yang berkaitan dengan kerusuhan Mei 1998.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang menggunakan analisis semiotika milik Roland Barthes, film ini menunjukkan berbagai bentuk mengenai bagaimana film *Pengepungan di Bukit Duri* merepresentasikan kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Visual yang ada film *Pengepungan di Bukit Duri* merepresentasikan adanya diskriminasi, kekerasan fisik dan seksual terhadap etnis Tionghoa, dan menunjukkan bagaimana posisi etnis Tionghoa digambarkan dalam struktur sosial.

Pada tingkat denotasi, kekerasan ditunjukkan secara nyata melalui adegan-adegan kerusuhan, pembakaran terhadap gedung dan rumah, pemukulan, dan pelecehan terhadap perempuan beretnis Tionghoa. Adegan-adegan ini menggambarkan situasi *chaos* dan ketidakamanan para kaum etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas dalam kondisi konflik sosial.

Pada tingkat konotasi, representasi kekerasan itu tidak hanya menunjukkan kekerasan secara fisik, namun juga memuat makna ketakutan, merasa terancam, dan kerentanan sosial yang dialami para kelompok etnis Tionghoa. Pada film ini juga memperlihatkan bagaimana etnis Tionghoa diposisikan sebagai kelompok yang terpinggirkan, tidak memiliki tempat yang aman, serta tidak memiliki kuasa untuk melindungi diri sendiri maupun melakukan perlawanan.

Sementara itu, pada tingkat mitos, film ini memberi makna bahwa kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti etnis Tionghoa itu dapat dinormalisasi dalam situasi krisis sosial, seperti mengatakan bahwa kekerasan itu merupakan tindakan yang wajar dari kondisi masyarakat yang tidak stabil. Dari perspektif relasi kuasa milik Michel Foucault, penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan rasial yang direpresentasikan dalam film merupakan hasil dari relasi kuasa yang tidak seimbang dari kelompok mayoritas dan minoritas.

Kekuasaan dalam konteks ini tidak hanya bekerja dari tindakan kekerasan secara langsung, namun juga dari wacana, normalisasi, dan pembiaran. Ketidakhadiran negara dan aparat keamanan dalam melindungi para etnis Tionghoa pada masa-masa kerusuhan tersebut juga menjadi bentuk praktik kekuasaan yang jadi memperkuat posisi minoritas sebagai kelompok yang rentan dan tidak memiliki akses terhadap keadilan.

Film *Pengepungan di Bukit Duri* juga merepresentasikan bagaimana negara membiarkan kekerasan yang terjadi menciptakan kondisi sosial yang di mana kelompok mayoritas memiliki banyak ruang untuk bertindak secara represif, sementara kelompok minoritas terpaksa untuk bertahan dalam ketakutan dan keterasingan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kekerasan rasial itu tidak hanya sekedar persoalan individu atau massa, namun menjadi persoalan struktural yang berkaitan dengan sistem kekuasaan dan kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa film *Pengepungan di Bukit Duri* tidak hanya merekam peristiwa kekerasan rasial sebagai bagian dari sejarah sosial Indonesia, tetapi juga menyampaikan bagaimana kritik sosial yang tajam terhadap relasi kuasa, ketimpangan struktural, dan kegagalan negara dalam melindungi kelompok minoritas. Melalui representasi itu, film ini berperan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan refleksi kolektif guna untuk memahami kekerasan rasial sebagai fenomena sosial yang kompleks dan berakar pada struktur sosial yang tidak adil.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif dengan analisis semiotika Roland Barthes yang digabungkan dengan teori relasi kuasa Michel Foucault itu efektif digunakan dalam mengungkap makna sosiologis dari representasi kekerasan rasial dalam film. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa film sebagai produk budaya memiliki peran yang penting dalam membentuk dan mereproduksi wacana sosial mengenai relasi kuasa, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti masyarakat etnis Tionghoa.

Pada penelitian ini masih ada sejumlah keterbatasan yang perlu disadari supaya hasil analisis dapat dipahami secara proposional. Keterbatasan pertama yaitu berkaitan dengan data penelitian. Data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari representasi visual dan naratif dalam film *Pengepungan di Bukit Duri*, sehingga temuan penelitian merefleksikan konstruksi makna yang dibangun oleh film sebagai teks budaya, bukan pengalaman langsung para korban atau realitas empiris peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi historis secara faktual, melainkan untuk memahami bagaimana kekerasan rasial direpresentasikan dan dimaknai dalam medium film.

Keterbatasan berikutnya yaitu pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis semiotika Roland Barthes yang bersifat interpretatif, sehingga hasil analisis sangat bergantung pada kerangka teori dan kemampuan peneliti dalam menafsirkan tanda dan simbol. Meskipun upaya validasi telah dilakukan melalui pembacaan berulang dan triangulasi teori dengan konsep relasi kuasa Michel Foucault, namun tetap terdapat kemungkinan munculnya perbedaan penafsiran apabila penelitian serupa dilakukan oleh peneliti lain dengan latar belakang atau perspektif teoritik yang berbeda.

Selain itu, keterbatasan juga terdapat pada objek penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada satu karya film, yaitu *Pengepungan di Bukit Duri*, sehingga temuan penelitian belum dapat dibandingkan secara langsung dengan representasi kekerasan rasial dalam film Indonesia lainnya atau dalam budaya populer yang berbeda. Fokus pada satu objek ini memungkinkan analisis yang mendalam, namun

juga membatasi ruang generalisasi terhadap representasi kekerasan rasial secara lebih luas dalam perfilman Indonesia.

Meskipun dengan beberapa keterbatasan tersebut, penelitian ini tetap diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami film sebagai teks budaya yang merepresentasikan relasi kuasa dan kekerasan rasial. Keterbatasan ini diharapkan dapat membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas objek kajian, menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, atau melibatkan perspektif audiens dan korban guna untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

### 5.1.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam ranah sosiologi budaya dengan menempatkan film sebagai teks sosial yang tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga memproduksi dan mereproduksi makna mengenai relasi kuasa dalam masyarakat. Melalui analisis semiotika dan relasi kuasa, penelitian ini menunjukkan bahwa karya audiovisual dapat menjadi ruang artikulasi ideologi, konflik identitas, serta ketimpangan sosial. Dengan demikian, film dipahami bukan sekadar produk hiburan, melainkan sebagai medium kultural yang memiliki posisi penting dalam pembentukan wacana sosial.

Dalam konteks minoritas, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana identitas etnis diproduksi dan dinegosiasikan melalui representasi media. Etnis Tionghoa dalam film *Pengepungan di Bukit Duri* tidak hanya digambarkan sebagai korban kekerasan, tetapi juga sebagai subjek yang dibentuk melalui stigma, pelabelan, serta relasi dominasi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa posisi minoritas tidak bersifat alami, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus direproduksi melalui wacana dan praktik budaya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengkaji dinamika marginalisasi sebagai proses yang berkelanjutan.

Gabungan antara semiotika Roland Barthes dan teori relasi kuasa Michel Foucault menjadi kontribusi teoretis yang signifikan dalam penelitian ini. Pendekatan

Barthes memungkinkan pembacaan tanda pada tingkat denotasi, konotasi, dan mitos, sementara Foucault memberikan kerangka untuk memahami bagaimana makna tersebut berkaitan dengan praktik kekuasaan. Kombinasi kedua teori ini menghasilkan analisis yang tidak berhenti pada simbol, tetapi juga mengungkap struktur kuasa yang mendasari representasi tersebut. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa makna visual dan naratif dalam film selalu berkelindan dengan relasi sosial yang lebih luas.

Penelitian ini juga memperkuat gagasan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui institusi formal, tetapi juga melalui produksi wacana budaya. Film sebagai medium populer menjadi bagian dari jaringan kuasa yang membentuk cara masyarakat memahami peristiwa sejarah dan identitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperluas aplikasi teori Foucault dan Barthes dalam konteks studi media Indonesia, khususnya dalam membaca representasi kekerasan rasial.

### **5.1.2 Implikasi Sosial**

Secara sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa film memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran publik mengenai isu kekerasan rasial. Dengan menghadirkan pengalaman korban dan memperlihatkan dampak psikologis yang ditimbulkan, film dapat membuka ruang empati dan refleksi bagi penonton. Representasi yang kritis terhadap ketimpangan sosial memungkinkan film berfungsi sebagai medium edukatif yang mengajak masyarakat untuk meninjau kembali prasangka dan stereotip yang berkembang.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa bagaimana bahayanya normalisasi kekerasan apabila representasi tidak dibaca secara kritis. Ketika kekerasan ditampilkan berulang tanpa penegasan terhadap ketidakadilannya, terdapat risiko bahwa penonton menganggapnya sebagai bagian dari dinamika sosial yang wajar. Oleh karena itu, penting bagi penonton untuk memahami konteks dan pesan yang ingin disampaikan, agar film tidak sekadar menjadi reproduksi trauma, tetapi juga sarana refleksi sosial.

Selain itu, pentingnya memori kolektif juga menjadi salah satu implikasi sosial yang signifikan. Film sebagai ruang memorialisasi berkontribusi dalam menjaga ingatan terhadap peristiwa kekerasan rasial agar tidak terlupakan. Ingatan kolektif berfungsi sebagai pengingat sejarah sekaligus sebagai upaya mencegah pengulangan kekerasan di masa depan. Dengan menghadirkan kembali pengalaman traumatis melalui media visual, film dapat membantu membangun kesadaran historis yang lebih luas dalam masyarakat.

Implikasi sosial lainnya adalah perlunya penguatan nilai kesetaraan dalam ruang pendidikan dan ruang publik. Representasi sekolah sebagai aset negara dalam film menunjukkan bahwa institusi sosial memiliki tanggung jawab dalam mencegah reproduksi stigma dan diskriminasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi bagi pembuat kebijakan, pendidik, serta praktisi media untuk lebih peka terhadap dampak representasi terhadap kelompok minoritas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa representasi kekerasan rasial dalam film bukan sekadar narasi dramatik, tetapi memiliki dampak dalam pembentukan persepsi sosial. Oleh karena itu, pembacaan kritis terhadap media menjadi penting agar film dapat berfungsi sebagai sarana transformasi sosial, bukan sebagai penguat ketimpangan yang sudah ada.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menyarankan agar kajian sosiologi, khususnya pada sosiologi budaya, untuk dapat terus mengembangkan analisis terhadap film sebagai produk budaya yang merepresentasikan relasi kuasa, kekerasan rasial, dan posisi kelompok minoritas dalam Masyarakat. Film tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, namun juga sebagai ruang produksi makna sosial yang dapat merefleksikan serta mengkritisi ketimpangan struktur sosial.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji isu kekerasan rasial dan minoritas dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti analisis wacana kritis atau

studi persepsi penonton. Pendekatan tersebut bisa memberikan perspektif tambahan mengenai bagaimana representasi kekerasan rasial dalam film itu dapat dipahami, dimaknai, dan berdampak pada kesadaran sosial masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dan pembuat kebijakan mengenai bagaimana pentingnya peran negara dalam melindungi kelompok minoritas dari berbagai bentuk kekerasan rasial dan diskriminasi. Dan juga, ketidakhadiran negara dalam situasi konflik sosial, seperti yang ditampilkan dalam film, menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan hukum dan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Bagi industri film dan para pelaku budaya populer, penelitian ini diharapkan dapat mendorong produksi karya-karya yang lebih sensitif dan bertanggung jawab dalam merepresentasikan isu kekerasan rasial dan kelompok minoritas. Dengan begitu, film dapat berperan sebagai media edukasi sosial yang tidak hanya merekam peristiwa historis, namun juga berkontribusi dalam membangun kesadaran yang kritis terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Penelitian ini berfokus pada analisis teks film sebagai representasi kekerasan rasial melalui pendekatan semiotika dan teori relasi kuasa. Namun demikian, masih terdapat ruang yang luas untuk pengembangan kajian lebih lanjut. Salah satu arah penelitian yang dapat dilakukan adalah studi resepsi penonton. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana audiens memaknai representasi kekerasan rasial yang ditampilkan dalam film.

Selain studi resepsi, penelitian komparatif terhadap film lain yang mengangkat isu serupa juga menjadi rekomendasi yang penting. Perbandingan dapat dilakukan dengan film Indonesia lain yang merepresentasikan konflik sosial atau isu etnis, maupun dengan film dari negara lain yang mengangkat tema minoritas dan diskriminasi. Studi komparatif memungkinkan peneliti melihat pola representasi yang berulang, perbedaan pendekatan naratif, serta variasi dalam konstruksi identitas minoritas. Dengan cara ini, kajian mengenai representasi kekerasan rasial dapat ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dan tidak terbatas pada satu teks film saja.

Adapun rekomendasi selanjutnya yaitu penelitian yang mengaitkan representasi film dengan kebijakan negara. Studi ini dapat mengeksplorasi bagaimana regulasi, kebijakan publik, atau sikap pemerintah terhadap isu etnis dan diskriminasi memengaruhi produksi dan distribusi film. Pendekatan ini penting untuk melihat hubungan antara teks budaya dan struktur politik secara lebih konkret. Analisis kebijakan juga dapat memperlihatkan sejauh mana negara berperan dalam mendorong atau membatasi narasi tertentu mengenai kekerasan rasial dalam ruang publik.

Penelitian lanjutan dapat mengembangkan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan perspektif sosiologi, kajian media, ilmu politik, dan psikologi sosial. Pendekatan semacam ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai dampak representasi kekerasan terhadap persepsi publik dan relasi antar kelompok. Dengan memperluas ruang kajian, penelitian mengenai kekerasan rasial tidak hanya berhenti pada analisis simbolik, tetapi juga menjangkau implikasi sosial dan kebijakan yang lebih konkret.

Secara keseluruhan, rekomendasi ini menunjukkan bahwa kajian mengenai representasi kekerasan rasial dalam film masih terbuka untuk pengembangan yang lebih luas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi penelitian-penelitian berikutnya yang lebih mendalam dan beragam, sehingga pemahaman mengenai relasi kuasa, identitas minoritas, serta peran media dalam membentuk memori kolektif dapat terus diperluas dan diperkaya.